

PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK

Novita Rolinsa Madina¹
Universitas Bina Taruna Gorontalo
novitamadina6@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi teknologi digital dalam administrasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui metode studi literatur, penelitian menganalisis bagaimana digitalisasi layanan publik berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan mengurangi potensi penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memfasilitasi akses informasi secara real-time, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik. Implementasi sistem seperti e-government dan standar akuntansi publik internasional (IPSAS) terbukti meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi. Namun, adopsi teknologi digital masih menghadapi tantangan signifikan, meliputi kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterampilan digital, hambatan psikologis masyarakat terhadap perubahan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan optimal teknologi digital dalam administrasi publik memerlukan pendekatan kolaboratif, peningkatan kebijakan organisasi, pelatihan yang memadai, dan penciptaan budaya yang mendukung perubahan untuk mengatasi tantangan yang ada serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kata kunci: **Administrasi Publik; Akuntabilitas; E-Government; Teknologi Digital; Transparansi.**

ABSTRACT

This research examines the implementation of digital technology in public administration as an instrument to strengthen government transparency and accountability. Through the literature study method, the research analyzes how the digitization of public services contributes to improving the quality of governance and reducing the potential for irregularities. The results show that digital technology facilitates real-time access to information, increases public participation in decision-making, and strengthens oversight of public financial management. The implementation of systems such as e-government and international public accounting standards (IPSAS) is proven to increase transparency and prevent corruption. However, the adoption of digital technology still faces significant challenges, including the digital divide, infrastructure limitations, lack of digital skills, psychological barriers to change, and weak coordination between stakeholders. This research concludes that the optimal use of digital technology in public administration requires a collaborative approach, improved organizational policies, adequate training, and the creation of a culture that supports change to overcome the challenges and provide maximum benefits to society.

Keywords: Public Administration; Accountability; E-Government; Digital Technology; Transparency.

PENDAHULUAN

Di era digitalisasi, pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, mulai mengimplementasikan e-government sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi potensi korupsi (Abdussamad et al., 2024). E-government menawarkan solusi yang transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diperlukan (Safitri, 2020). Salah satu aspek penting dalam penerapan teknologi digital adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Sebuah studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk transparansi, hasilnya masih kurang optimal, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan transparansi (Arkarizki et al., 2023). Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa inisiatif berbasis teknologi, seperti sistem informasi online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, telah menunjukkan potensi signifikan dalam mengurangi antrian dan meminimalisir penyimpangan (Tere et al., 2024). Hal ini memperlihatkan bagaimana teknologi dapat secara drastis mengubah cara layanan publik disampaikan dan meningkatkan akuntabilitas di mata masyarakat.

Data statistik terkini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 70% pada tahun 2023 (Abdussamad et al., 2024). Hal ini menggambarkan potensi yang besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas akses layanan publik. Misalnya, aplikasi Sabdopalon di Kabupaten Jombang menunjukkan efektivitas yang baik dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik secara digital, meskipun terdapat tantangan terkait aksesibilitas dan infrastruktur (Chumairoh & Widiyarta, 2024). Pelatihan dan sosialisasi dalam penggunaan teknologi juga menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital (Pramono et al., 2023).

Dalam konteks penegakan akuntabilitas, penerapan sistem informasi akuntansi dan mekanisme digital lainnya terbukti dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Seperti yang dibahas dalam penelitian mengenai sistem informasi pelayanan publik di desa Sumberdadi, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses administrasi lainnya dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi (Nirsal et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital tidak hanya bermanfaat untuk mempercepat proses administrasi tetapi juga untuk mempertinggi akuntabilitas dan transparansi.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi digital dalam administrasi publik berpotensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun tantangan tetap ada, termasuk ketersediaan infrastruktur yang merata dan pelatihan bagi pengguna, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar, sehingga mewajibkan adanya

perhatian dan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak dalam implementasi kebijakan ini (Sutangsa, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi digital dalam administrasi publik agar dapat memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta menganalisis tantangan dan hambatan utama dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur ditujukan untuk mengevaluasi dan merangkum penelitian terdahulu yang relevan, serta mengidentifikasi tren, tema, dan kesenjangan dalam penelitian mengenai penerapan teknologi digital dalam administrasi publik. Metode ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana teknologi digital telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap akuntabilitas dalam perkembangan administrasi publik (Salsabila et al., 2024). Selain itu, studi literatur dapat menyajikan analisis yang lebih dalam mengenai cara-cara teknologi digital diadopsi oleh berbagai instansi dan dampaknya terhadap kebijakan publik.

Pengumpulan data dalam studi literatur dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengakses berbagai sumber yang terkait, seperti jurnal akademis, artikel, buku, dan dokumen kebijakan yang berhubungan dengan teknologi digital dalam administrasi publik. Peneliti perlu melakukan pencarian sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari topik yang ditinjau tercakup dalam analisis. Hal ini mencakup perhatian terhadap konteks dan variasi geografis, seperti studi yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia atau negara lain yang menerapkan teknologi digital dalam layanan publik (Rawung et al., 2021). Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, model, atau praktik terbaik yang ditemukan dalam berbagai literatur. Ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis tren yang ada, mengevaluasi efektivitas teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada (Harahap & Harahap, 2023). Hasil analisis ini bisa memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut dan praktik dalam administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Teknologi Digital Dalam Administrasi Publik Dapat Memperkuat Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas

Implementasi teknologi digital dalam administrasi publik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan digitalisasi layanan publik, informasi yang relevan dapat diakses oleh masyarakat secara real-time,

membantu mereka untuk lebih memahami prosedur dan keputusan pemerintah (Unynets-Khodakivska et al., 2023). Hal ini menciptakan lingkungan di mana akuntabilitas menjadi norma. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi digital adalah perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai publik serta masyarakat untuk memastikan mereka mampu memanfaatkan alat dan sistem baru secara efektif. Sebagai contoh, gagasan bahwa digitalisasi merupakan alat yang memberikan pemerintah kekuatan untuk melakukan penilaian akuntabilitas dan transparansi harus diimbangi dengan kesiapan dan keterampilan pengguna di lapangan.

Lebih lanjut, dengan adanya risiko yang terkait dengan privasi dan pengolahan data, penting bagi pemerintah untuk menetapkan kerangka kerja yang tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga melindungi hak-hak individu. Dalam konteks ini, pemerintahan yang mengadopsi teknologi digital tidak hanya memenuhi tuntutan efisiensi tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik, menciptakan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Sapa et al., 2024). Dengan demikian, digitalisasi dalam administrasi publik harus dilihat sebagai bagian integral dari reformasi untuk mencapai keterbukaan publik yang lebih baik dan membangun akuntabilitas yang lebih kuat.

Salah satu hasil utama dari implementasi teknologi digital adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan informasi publik. Menurut penelitian oleh Lyezia dan Kapaya (Lyezia & Kapaya, 2024), transparansi yang lebih baik di sektor publik berhubungan langsung dengan kinerja keuangan yang lebih baik dan pengurangan tingkat persepsi korupsi. Dengan penyediaan akses informasi yang lebih mudah melalui platform digital, masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik dan administrasi pemerintah secara lebih efektif.

Teknologi digital memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dari publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam studi oleh Riyadh (Riyadh et al., 2023) yang menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya platform digital yang memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan warga, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat meningkat, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas.

Implementasi sistem pengawasan berbasis digital juga merupakan faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas. Menurut penelitian oleh Muraina dan Dandago (Muraina & Dandago, 2020), penggunaan standar akuntansi publik internasional (IPSAS) memberikan struktur yang lebih baik untuk akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan dalam laporan keuangan. Utilisasi alat IT dalam audit dan pelaporan memungkinkan deteksi dan perbaikan lebih cepat terhadap kesalahan dan potensi penyalahgunaan anggaran.

Tantangan Dan Hambatan Utama Dalam Adopsi Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Administrasi Publik

Tantangan dan hambatan dalam adopsi teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik sangat kompleks dan beragam. Para peneliti menunjukkan bahwa berbagai kendala sering kali muncul, termasuk kesenjangan digital, kurangnya keterampilan, serta resistensi terhadap perubahan. Harefa menyatakan bahwa kebijakan organisasi yang jelas dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi implementasi teknologi baru sering menghadapi hambatan dari budaya organisasi yang ada (Harefa et al., 2024). Selain itu, Alfarizi menunjukkan bahwa kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi sangat berpengaruh terhadap niat mereka untuk beradaptasi dengan teknologi digital, seperti dalam penggunaan KTP digital di Indonesia (Alfarizi, 2023).

Satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, yang sering kali menyebabkan perbedaan dalam aksesibilitas dan penggunaan layanan digital di antara komunitas yang berbeda. Penelitian oleh Husni menegaskan bahwa meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam birokrasi, kurangnya infrastruktur dan keterampilan di beberapa daerah masih merupakan masalah signifikan (Husni, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Putri mencatat bahwa meskipun layanan publik berbasis online membawa banyak keuntungan, kendala teknis dan keterbatasan aksesibilitas tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa di berbagai daerah (Putri et al., 2024).

Hambatan psikologis juga memegang peranan penting. Masyarakat seringkali merasa ragu terhadap perubahan, terutama jika mereka tidak merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan teknologi baru. Hal ini diuraikan oleh Fitrah, yang menunjukkan bahwa pelibatan langsung masyarakat dalam proses adopsi teknologi dapat mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan teknologi digital (Fitrah et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai, seperti yang dilakukan dalam proyek pelatihan perangkat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital (Ummah, 2022).

Di sisi lain, permasalahan internal di dalam birokrasi, seperti lemahnya koordinasi antara pemangku kebijakan, juga menjadi tantangan. Hasil penelitian dari Abidin menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam program pemberdayaan petani sering kali terhambat oleh kurangnya kolaborasi antar stakeholder (Abidin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan teknologi digital secara efektif dalam administrasi publik, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan dan meminimalkan silo organisasi yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik melalui teknologi digital jelas membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk peningkatan kebijakan organisasi, peningkatan keterampilan masyarakat, dan penciptaan budaya yang mendukung perubahan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan adopsi teknologi digital dalam administrasi publik dapat berjalan lebih mulus, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi teknologi digital dalam administrasi publik telah terbukti memiliki peran signifikan dalam memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara real-time, memantau penggunaan dana publik, dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Sistem pengawasan berbasis digital dan penerapan standar akuntansi publik internasional (IPSAS) juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Namun, adopsi teknologi digital dalam administrasi publik masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, di antaranya kesenjangan digital yang menyebabkan perbedaan aksesibilitas layanan di berbagai daerah, kurangnya infrastruktur dan keterampilan digital, serta hambatan psikologis berupa keraguan masyarakat terhadap perubahan teknologi. Permasalahan internal birokrasi seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan teknologi digital secara efektif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, peningkatan kebijakan organisasi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat dan aparatur pemerintah, serta penciptaan budaya yang mendukung perubahan. Dengan demikian, potensi teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Karinda, K., Nursin, E., & Sandewa, F. (2024). E-Government Di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik Dan Dampaknya Pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik. In *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.111>
- Abidin, Z. (2022). Stakeholder Accountability in Farmers Empowerment Program Through People's Business Credit. In *Inovasi*. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.561>
- Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk Dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital Dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. In *Jurnal Studi Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>

- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. In *Jane - Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111>
- Chumairoh, D. A., & Widiyarta, A. (2024). Efektivitas Aplikasi Sabdopalon Dalam Meningkatkan Digital Governance Di Kabupaten Jombang. In *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i1.11447>
- Fitrah, N., Mustanir, A., Akbari, M. S., Ramdana, R., Jisam, J., Nisa, N. A., Qalbi, N., Febriani, A. F., Irmawati, I. S., Muh. A. R., & Ilham, I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Swadaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Potensi Desa. In *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6208>
- Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pengambilan Keputusan Tata Negara. In *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/10.29210/1202323208>
- Harefa, H. S., Lahagu, P., Zebua, E., & Waruwu, E. (2024). Peran Kebijakan Organisasi Dalam Pengembangan Budaya Organisasi Yang Efektif Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i2.55>
- Husni, M. F. (2023). Pilar Utama Konsep Birokrasi: Efisiensi Dan Akuntabilitas. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dpv9b>
- Lyezia, M. S., & Kapaya, S. (2024). Influence of Transparency and Accountability on Public Sector Financial Performance: Evidence From Tanzania. In *Journal of Economics Management and Trade*. <https://doi.org/10.9734/jemt/2024/v30i81233>
- Muraina, S. A., & Dandago, K. I. (2020). Effects of Implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria's Financial Reporting Quality. In *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/ijpsm-12-2018-0277>
- Nirsal, N., Jumardi, A., Syafriadi, S., Nurfalaq, A., & Putri, I. K. (2024). Penerapan Sistem Informasi Layanan Publik Di Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. In *Jurnal Abdi Insani*. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1849>
- Pramono, A., Setiawan, I., Muntahar, A. A., & Nugroho, A. D. (2023). Pelatihan Aplikasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online Bagi Masyarakat Desa Rempoah Guna Mempermudah Proses Pelayanan. In *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1406>
- Putri, F. L. S., Iffat, E., Irwanto, M., Iman, M. F., Sutrisno, S., & Hermawan, S. (2024). Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa (Studi Pada Desa Permisian Kecamatan Jabon). In *Journal of Economic Bussines and Accounting (Costing)*. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.11141>
- Rawung, R. K. S., Rawis, J. A. M., Wullur, M. M., & Rotty, V. N. J. (2021). Indikator Tantangan Efektivitas Supervisi Instruksional Kepala Sekolah. In *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.24036/jbmb.v10i2.115417>

- Riyadh, D. H., Supriati, B. C., & Lopez, T. C. (2023). Transparency and Policy Implementation in the Public Sector in Singapore. In *Journal of Public Policy & Governance*. <https://doi.org/10.53819/81018102t5223>
- Safitri, L. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mengakses Kredit Bagi Petani. In *The World of Business Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wbaj.vi.750>
- Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik Melalui Kecerdasan Buatan. <https://doi.org/10.47134/pjise.v1i2.2401>
- Sapa, A., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2024). Public Sector Accounting: A Key to Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). In *Asian Journal of Applied Business and Management*. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v3i4.12250>
- Sutangsa, S. (2024). Peran Aparat Administrasi Publik Dalam Pencegahan Korupsi: Suatu Analisis Perspektif. In *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i2.1888>
- Tere, T. S. P., Nirwan, S., & Resdiana, W. (2024). Implementasi Algoritma Linear Search Untuk Optimasi Pencarian Pendaftar Di Disdukcapil Kabupaten Subang. <https://doi.org/10.69916/jkbt.v3i3.158>
- Ummah, A. (2022). Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis Website Menuju Desa Digital Untuk Perangkat Desa Baros, Serang, Banten. In *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*. <https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.267>